

**KAJIAN IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA
ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)
STUDI KASUS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN
MESJID RAYA SUMATERA BARAT TAHAP KEDUA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Strata-1 Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas Padang*

Oleh :

ARY DWI SANTOSO
06172050

Pembimbing :

DR. BAMBANG ISTIJONO, ME
YERVI HESNA, MT



**JURUSAN TEKNIK SIPIL-FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. *E-procurement* menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

Skripsi ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana tahapan dalam pelaksanaan *e-procurement* itu berjalan dimulai dari pembuatan paket lelang oleh PPK sampai penandatanganan kontrak. Tahapan yang dilalui saat lelang konvensional tidak berbeda dengan yang dilalui dengan pelaksanaan *e-procurement*. Bedanya hanya saja *e-procurement* dilaksanakan dengan media elektronik, yaitu internet. Berarti semua tahapan dalam *e-procurement* dilalui tanpa harus melakukan tatap muka antara pihak-pihak yang terkait dalam pelelangan sebagaimana yang terjadi pada lelang konvensional.

Hasil dari skripsi ini akan memaparkan dengan jelas bagaimana tahapan dalam pelelangan berjalan dengan *e-procurement*, sehingga keraguan bagaimana lelang itu dapat berjalan dapat terjawab.

Kata Kunci : *e-procurement*, implementasi, kendala, solusi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengadaan jasa konstruksi sangat erat kaitannya dengan dunia sipil, khususnya bagi mereka yang nantinya berminat untuk menjadi seorang penyedia barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan kontraktor. Mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi menyangkut kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan sesuatu yang tidak boleh untuk mereka lewatkan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin untuk menjadi seorang kontraktor besar bila tidak mengetahui perkembangan dalam dunia pelelangan.

Salah satu perkembangan besar yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa adalah dilakukannya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Pelaksanaan *e-procurement* tentunya berbeda jauh dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional. Dilihat dari namanya saja *e-procurement* sudah jelas dilaksanakan secara elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Tidak hanya dari segi pelaksanaan, dari segi manfaat atau keuntungan yang dirasakanpun *e-procurement* berbeda dengan pelelangan yang dilakukan secara konvensional. Keuntungan utama *e-procurement* meliputi penghematan uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar

waktu dan uang. Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam *supply chain*. Selain itu sistem *e-procurement* membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pentingnya *e-procurement* tidak hanya dirasakan oleh pihak penyedia barang/jasa tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*Electronic Government Procurement* atau *EGP*), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan, dan peluang usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem elektronik atau biasa disebut *Electronic Government*

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan :

1. Tahap pelaksanaan lelang Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat Tahap Kedua telah sesuai dengan Kepres No 80 Tahun 2003.
2. Setiap pihak yang terlibat dalam lelang Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat Tahap Kedua telah melakukan tugasnya sesuai dengan Kepres No 80 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 7 Tahun 2009.
3. Masa pelaksanaan tahapan dalam proses lelang Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat Tahap Kedua ini umumnya lebih panjang dari peraturan yang ditetapkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan karena dalam peraturan hanya ditetapkan batas minimal pelaksanaan suatu tahap pelelangan, jadi untuk penetapan waktu sesungguhnya diserahkan sepenuhnya kepada panitia yang bersangkutan.
4. Tersisihnya perusahaan pada proses evaluasi untuk lelang Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat Tahap Kedua ini tidak disebabkan oleh sistem, tetapi murni disebabkan karena kesalahan dalam pembuatan penawaran.

DAFTAR PUSTAKA

- LPSE Provinsi Sumatera Barat. "*Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) dan Implementasi LPSE Provinsi Sumatera Barat*". Disampaikan pada sosialisasi LPSE Provinsi Sumatera Barat, Padang, 20 Juni 2010.
- LPSE Provinsi Sumatera Barat. "*Presentasi Pengenalan dan Aplikasi LPSE*". Disampaikan pada sosialisasi LPSE Provinsi Sumatera Barat, Padang, 20 Juni 2010.
- Aprileni, Sulvi. "*Analisa Faktor Internal Dalam Implementasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Bara*". Skripsi tidak diterbitkan. Padang : Program S-1 Universitas Negeri Padang,2010.
- "Layanan Pengadaan Secara Elektronik". <http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=2580235452> diakses Juni 2010.
- Info Bisnis, "*Seputar E-Procurement*",PT. Info Bisnis Network,Edisi No.4,2010.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,"*e-procurement Pengembangan dan Implementasinya di Indonesia*",Jakarta Selatan,2010.
- Chantika, Yulidays. "*Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung RRI Kebidanan, Anak dan Hemodialisa RSUP DR. M. Djamil Tahap I dengan Aplikasi Primavera versi 3.1*". Skripsi tidak diterbitkan. Padang : Program S-1 Universitas Andalas,2009.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,"*Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*",Jakarta,November 2009.